



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2023

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANJARBARU**

2023

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru dapat tersusun. Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru disusun dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 – 2026 dengan menyelaraskan kondisi serta isu-isu strategis yang ada pada saat ini.

Rencana Kerja Perubahan ini nantinya selain sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan, program dan arah kebijakan selama jangka waktu 1 Tahun, juga akan menjadi acuan untuk evaluasi kinerja melalui pengukuran kinerja/organisasi dengan berdasar pada data realisasi dan tingkat pencapaian target yang dapat dipertanggungjawabkan baik di lapangan (fisik) maupun administrasi.

Kami menyadari masih banyak kekurangan – kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini dan berharap adanya masukan dari pihak manapun untuk menyumbangkan buah pikiran dan tenaganya demi penyempurnaan Renja Perubahan ini.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Walikota Banjarbaru dan semua pihak yang telah membantu, semoga Renja Perubahan Tahun 2023 ini bermanfaat bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru dan pihak yang berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

Banjarbaru, Agustus 2023

KEPALA DINAS,


SIRAJONITA P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750610 199501 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
 BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023	 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023.....	5
 BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	 14
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	14
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	15
 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	 17
 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	 23
 BAB VI PENUTUP	 39

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, disamping juga berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023. Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain : penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan serta kegiatan perencanaan dalam rangka mencapai prioritas pembangunan

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021.
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2023 ini adalah :

- a. Merupakan suatu dokumen perubahan perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam merencanakan perubahan anggaran.
- b. Merupakan suatu alat untuk mengukur kinerja instansi yang efektif, berkelanjutan
- c. Merupakan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilaksanakan.
- d. Merupakan gambaran terhadap kinerja OPD sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan

Triwulan II Tahun 2023

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Dinas Lingkungan Hidup memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu terjaganya kualitas Lingkungan Hidup dan meningkatnya manajemen pengelolaan persampahan. Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Banjarbaru pada tahun 2021-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu-isu yang menjadi landasan dalam perumusan strategi dalam penyusunan program dan kegiatan dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan penggunaan teknologi informasi misalnya pelayanan pengaduan masyarakat dengan aplikasi Lapor
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup guna mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
3. kualitas lingkungan yang baik akan terlihat dari indeks kualitas lingkungan hidup.
4. Pengelolaan sampah juga menjadi perhatian, karena kesadaran masyarakat dalam mengolah dan mengelola sampah masih kurang.
5. belum tercapainya luasan minimal Ruang Terbuka Hijau Publik

Evaluasi Kinerja

Sedangkan untuk mengukur kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru maka ditetapkan indikator kinerja dengan kategori sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran Keberhasilan dari suatu tujuan dan

sasaran strategis organisasi yang dilaksanakan oleh unit kerja mandiri. Indikator Sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Untuk hasil Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, sebagai berikut

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota				
1. Administrasi Barang Milik Daerah SKPD				
a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	16.500.000,00	7.356.500,00	9.143.500	44,58
b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000,00	6.067.400,00	13.932.600	30,34
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah				
a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.058.000	5.690.000	4.368.000	56,57
b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	347.399.500	152.193.395	195.206.105	43,81
c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.214.000	3.821.000	3.393.000	52,97
d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	960.000	1.040.000	48,00
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	126.810.000	108.061.385	18.748.615	85,22
f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	45.100.000	-	45.100.000	0,00
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah				
a. Pengadaan Mebel	102.728.000	18.350.000	84.378.000	17,86
b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124.937.000	102.075.000	22.862.000	81,70
c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	100.000.000		100.000.000	0,00

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung/Kantor atau bangunan lainnya	14.714.000	4.919.000	9.795.000	33,43
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.670.000	50.978.503	148.691.497	25,53
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	318.963.520	70.135.000	248.828.520	21,99
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.000.000	23.230.500	35.769.500	39,37
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	172.000.000	57.657.900	114.342.100	33,52
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	29.920.000	18.390.000	11.530.000	61,46
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	441.360.000		441.360.000	0,00
e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.640.000	7.310.000	7.330.000	49,93
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	8.495.100	16.504.900	33,98
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	8.879.000	21.121.000	29,60
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.965.382.805	3.424.914.343	2.540.468.462	57,41
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	46.095.000	28.479.000	17.616.000	61,78
Program Perencanaan Lingkungan Hidup				
1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/kota				
a. Penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/kota	189.238.500	1.770.500	187.468.000	0,94
2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/kota				
a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	281.850.000	7.143.108	274.706.892	2,53
b. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	421.897.500	42.930.000	378.967.500	10,18
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				
1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupate/Kota				
a. Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	100.000.000	51.900.000	48.100.000	51,90
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)				
1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				
a. Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	25.000.000	4.200.000	20.800.000	16,80

b. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	187.000.000	41.718.000	145.282.000	22,31
c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.576.503.400	297.848.400	2.278.655.000	11,56
d. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	99.993.000	45.703.100	54.289.900	45,71
Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
1. Pencegahan Pencemaran dan /atauKerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	214.999.900	50.808.400	164.191.500	23,63
b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	65.000.000		65.000.000	0,00
2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	24.999.800	12.445.600	12.554.200	49,78
3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/kota				
a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	25.000.000		25.000.000	0,00
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	29.931.000	2.740.000	27.191.000	9,15
c. Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan restorasi	30.000.000		30.000.000	0,00
Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)				
1. Penyimpanan Sementara Limbah B3				

a. Fasilitas Pemenuhan komitmen izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	35.020.400	2.770.000	32.250.400	7,91
b. Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah b3	14.999.500		14.999.500	0,00
Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)				
1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
a. Pengembangan Kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup	24.999.400		24.999.400	0,00
b. Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	309.669.800	79.399.689	230.270.111	25,64
Program penanganan pengaduan lingkungan hidup				
1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				
a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	24.999.900	8.255.500	16.744.400	33,02
Program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat				
1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	155.000.000	20.350.200	134.649.800	13,13
b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	100.000.000	3.334.000	96.666.000	3,33

Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan PPLH 1. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal , Pengetahuan Tradisional, dan HAK MHA yang terkait dengan PPLH a. Koordinasi, sinkronisasi , penyediaan data dan informasi pengakuann keberadaan MHA Kearifan Lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan loal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	40.000.000	13.870.000	26.130.000	34,68
Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat 1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a. Penilaian Kinerja Masyarakat /Lembaga/Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	178.273.600	13.807.800	164.465.800	7,75
Program Pengelolaan Persampahan 1. Pengelolaan Sampah a. Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan pendauran ulang dan Pemanfaatan kembali b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 2. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta a. Monitoring Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampahn	1.187.720.000 60.000.000 19.262.050.050 40.000.000	297.509.028 14.600.000 5.861.572.350 14.293.800	890.210.972 45.400.000 13.400.477.700 25.706.200	25,05 24,33 30,43 35,73
Program Pengelolaan Persampahan				

1. Pengelolaan Sampah				
a. Penanganan sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	4.037.058.450	1.015.023.991	3.022.034.459	25,14
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan	792.000.000	384.937.200	407.062.800	48,60
2. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta				
a. Fasilitasi Pemenuhan ketentuan terkait izin usaha dan Standar Teknis pengelolaan Sampah	148.000.000	90.850.000	57.150.000	61,39
Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UPT)				
1. Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
a. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	500.526.900	151.837.400	348.689.500	30,34
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota				
1. Administrasi Umum Perangkat Daerah				
a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.396.500	990.000	2.406.500	29,15
b. Penyediaan bahan logistic Kantor	17.415.000	7.993.850	9.421.150	45,90
c. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	4.400.000	1.998.000	2.402.000	45,41
d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.776.000	888.000	1.776.000	50,00
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	26.795.000		26.795.000	0,00
2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung/Kantor atau bangunan lainnya	2.598.000		2.598.000	0,00
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.990.000	48.594.504	50.395.496	49,09
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.800.000	4.500.000	6.300.000	41,67
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.100.000	11.387.600	712.400	94,11
JUMLAH	39.579.493.425	12.715.933.046	26.841.372.279	32,13

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi rakyat yang berdaya saing merupakan landasan utama dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional umumnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada khususnya, sehingga diharapkan akan dapat diwujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, terciptanya lingkungan berusaha yang aman dan nyaman, peningkatan kompetensi dan daya saing pelaku usaha perdagangan dan jasa serta industri kecil/rumah tangga.

Kemajuan dan kemampuan ekonomi daerah akan dipengaruhi oleh sumbangan (share) masing-masing sektor ekonomi yang membentuk kerangka ekonomi daerah sebagaimana tercermin dalam PDRB daerah setiap tahunnya, kekuatan masing-masing sektor sangat tergantung kepada kebijakan pembangunan, kondisi daerah serta kemampuan pendanaan yang akan tergambar dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tiap tahunnya.

Dari hasil analisa serta fakta pendukung di lapangan, maka untuk tahun 2023 rancangan kerangka ekonomi daerah Kota Banjarbaru akan tetap disinergikan/mengacu pada rencana kerja pembangunan baik secara Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu masih akan diarahkan untuk mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan pelaku usaha mikro dan kecil serta pariwisata dan ekonomi kreatif, mendorong investasi seluruh bidang usaha baik industri barang maupun ekonomi kreatif, menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menekan laju inflasi, meningkatkan kualitas pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, infrastruktur), peningkatan kualitas sumber daya manusia, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022

Perekonomian Kalimantan Selatan tahun 2022 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 5.11% dibandingkan pencapaian pada tahun 2021 yang mencapai 3.48%. Sedangkan Kota Banjarbaru mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi yang positif, mencapai 7.93% pada tahun 2022 dibandingkan 3.32% pada tahun 2021.

Peningkatan ini dipengaruhi oleh perbaikan perlahan ekonomi global dan domestik didukung oleh program vaksinasi COVID-19 yang berkelanjutan. Namun, adanya risiko konflik antara Rusia dan Ukraina berpengaruh pada perekonomian.

Harga minyak dunia yang masih tinggi dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik khususnya antara Rusia dan Ukraina, menyebabkan harga eceran BBM dan BBRT meningkat dan memberikan tekanan pada harga barang dan jasa lain.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023

Tantangan secara umum yang menjadi permasalahan hampir semua perkotaan di Indonesia pada dimensi ekonomi dapat dilihat dari marginalisasi sektor-sektor ekonomi informal. Sementara, diketahui bahwa sektor informal ini mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi riil antara 20-70%. Marginalisasi sektor informal memicu permasalahan kemiskinan perkotaan, kesenjangan, hingga krisis global.

Tantangan utama perekonomian kota Banjarbaru pada tahun 2023 masih akan bergelut dengan usaha pemulihan ekonomi pasca pandemi. Laju pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pada tahun 2023 sampai dengan triwulan II masih diperkirakan bahwa kondisi ekonomi Banjarbaru, regional, nasional maupun global masih berada pada tahap pasca pemulihan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pemerintah Kota Banjarbaru merencanakan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, disebabkan adanya perbedaan asumsi Kebijakan Umum APBD, yaitu perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja, dan perubahan rencana penggunaan/pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun sebelumnya serta perubahan yang di sebabkan adanya kebijakan dari pemerintah pusat.

Perubahan rencana pendapatan disebabkan adanya perubahan target PAD dan perubahan alokasi dana transfer sedangkan perubahan rencana belanja daerah meliputi penambahan alokasi belanja maupun penggeseran anggaran baik antar belanja maupun antar program dan kegiatan. Perubahan rencana belanja dipengaruhi adanya penyesuaian target dan penganggaran untuk menjawab isu-isu strategis yang berkembang.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah pada tahun terakhir, target pada APBD tahun berjalan, dan proyeksi tahun rencana serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pendapatan daerah dalam APBD Kota Banjarbaru.

Adapun arah kebijakan pendapatan daerah meliputi :

1. Merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum, dengan perkiraan yang terukur, rasional,

sesuai potensi riil;

2. Menyesuaikan rencana target pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai serta memperhatikan capaian sampai dengan semester II Tahun Anggaran 2023.
3. Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan dukungan data dalam rangka optimalisasi penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi;
4. Optimalisasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah

adalah salah satu komponen pengeluaran pemerintah daerah, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Disamping itu juga membiayai penyelenggaraan organisasi perangkat daerah yang bersifat mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan, organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi kewilayahan, serta organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik sepanjang belum diperoleh kepastian pendanaan dari APBN.

Sebagai salah satu entitas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kebijakan belanja dalam APBD dipengaruhi pula oleh kebijakan yang berskala nasional dari pemerintah pusat dan kebijakan yang masuk dalam prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Selatan. Arah kebijakan belanja daerah Kota Banjarbaru pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

1. Penyesuaian target untuk mencapai pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan isu strategis yang berkembang.
2. Penyesuaian belanja rutin (gaji/tunjangan dan operasional) untuk mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan daerah dan Belanja Daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang dan penyertaan modal.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru terdiri dari 11 (sebelas) program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan

Untuk selengkapnya pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam usulan tahap 1 perubahan Renja dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada table berikut:

NO	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	PAGU (Rp)			Keterangan
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	38.900.696.025	58.060.315.882	19.159.619.857	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	30.000.000	5.000.000	perjalanan dinas dalam daerah, Makan minum rapat dan ATK
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	35.000.000	5.000.000	perjalanan dinas dalam daerah, Makan minum rapat dan ATK
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.965.382.805	6.116.530.662	151.147.857	penambahan gaji dan tunjangan
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	46.095.000	51.095.000	5.000.000	penambahan ATK., bahan komputer dan makan minum rapat
5	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	16.500.000	16.500.000	0	
6	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000	20.000.000	0	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.058.000	15.058.000	5.000.000	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	347.399.500	350.399.500	3.000.000	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.214.000	12.157.000	4.943.000	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	2.000.000	0	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.810.000	217.040.000	90.230.000	penambahan perjalanan dinas biasa Luar daerah

12	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	45.100.000	45.100.000	0	
13	Pengadaan Mebel	102.728.000	210.511.300	107.783.300	pengadaan kursi kerja staf, kursi kerja plastik, meja rapat premium, lemari pajangan, sofa premium untuk ruang kepala dinas, sofa tamu di loby, rak arsip kantor
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124.937.000	363.955.000	239.018.000	pengadaan PC All in one, Laptop, printer multi fungsi, printer A3, Running teks, Kamera DSLR, dan tripod kamera
15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000	0	
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	14.714.000	37.233.000	22.519.000	Pengadaan Ac 2 Pk, TV android, dispenser, rak piring, papan informasi, microfon warelase.
17	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	199.670.000	120.700.000	-78.970.000	realisasi sampai bulan mei Rp. 50.000.000,- (rata-rata Rp.10.000.000 perbulan) Sehingga di geser untuk keperluan lain
18	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	318.963.520	178.733.520	-140.230.000	pengurangan Gaji jasa tenaga administrasi 5 orang
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.000.000	59.000.000	0	
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	172.000.000	172.000.000	0	
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.920.000	29.920.000	0	
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	441.360.000	441.360.000	0	
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.640.000	14.640.000	0	
24	penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/kota	189.238.500	289.238.500	100.000.000	Validasi RPPLH

25	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	281.850.000	281.850.000	0	
26	Pembuatan dan Pelaksanaaan KLHS RPJPD/RPJMD	421.897.500	421.897.500	0	
27	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah,Air,Udara, dan Laut	214.999.900	331.329.700	116.329.800	pengadaan sepatu lapangan, pemeriksaan sample air bersih, sungai, sample tahu, penambahan gaji honorer 2 bulan, masterplan perlindungan mata air, perjalanan dinas dalam daerah 927 OH
28	Koordinasi ,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	65.000.000	65.000.000	0	
29	Pemberiaan Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	24.999.800	24.999.800	0	
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	25.000.000	25.000.000	0	
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	29.931.000	29.931.000	0	
32	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan restorasi	30.000.000	30.000.000	0	
33	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	25.000.000	25.000.000	0	
34	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	187.000.000	208.600.000	21.600.000	penambahan Gaji pekerja taman kehati, penambahan perjalanan dinas dalam kota
35	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.576.503.400	5.765.375.900	3.188.872.500	- Pengadaan Truk Amroll 2 unit, Pengadaan mobil crane 1 unit, pengadaan kendaraan roda tiga 2 unit, pembangunan RTH Almunawarah, pengurangan pembangunan RTH Fasum di kecamatan landasan ulin, pembangunan fasilitas taman keaneka ragaman hayati 1 paket

36	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	99.993.000	129.479.000	29.486.000	pengadaan tandon, pompa air, gaji tenaga honorer 2 bulan, perjalanan dinas dalam kota, pemeliharaan taman kehati
37	Fasilitasi Pemenuhan komitmen izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	35.020.400	30.520.400	-4.500.000	di geser untuk pengadaan printer muti fungsi pada sub kegiatan di Umpeg
38	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah b3	14.999.500	22.499.500	7.500.000	Perjalanan Dinas dalam daerah 300 OH
39	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	100.000.000	166.300.000	66.300.000	Penambahan perjalanan dinas dalam kota 2000 OH, penambahan gaji non asn 2 bulan
40	Pengembangan Kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup	24.999.400	24.999.400	0	
41	pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	309.669.800	673.309.800	363.640.000	penambahan gaji honorer 2 bulan, perjalanan dinas dalam daerah 2500 OH, pengadaan kendaraan dinas operasional lapangan 1 unit.
42	Koordinasi, sinkronisasi , penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA Kearifan Loal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan loal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	40.000.000	40.000.000	0	
43	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	155.000.000	139.500.000	-15.500.000	pengurangan kegiatan adiwiyata, untuk dipindahkan digeser ke pengadaan komputer kantor di sub kegiatan Umpeg
44	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	100.000.000	200.000.000	100.000.000	perjalanan dinas luar daerah untuk pengelola bank sampah
45	Penilaian Kinerja Masyarakat /Lembaga/Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	178.273.600	288.211.600	109.938.000	belanja pakaian dinas lapangan dan sepatu lapangan, penambahan belanja makan minum aktifitas lapangan, belanja hadiah untuk kegiatan eco office,

46	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	24.999.900	24.999.900	-	
47	Pengurangan Sampah Dengan Melakukan pembatasan , pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	1.187.720.000	1.290.520.000	102.800.000	penambahan gaji pekerja PDU sebanyak 2 bulan, honor jasa tenaga ahli jakstrada
48	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA/ Kabupaten/Kota	4.037.058.450	9.150.060.450	5.113.002.000	penambahan BBM dan cadangan 2024, penambahan suku cadang alat berat, gaji pekerja untuk 2 bulan dan upah diluar hari dan jam kerja, Service, pembelian Dozeer satu unit, excavator besar 1 unit, pengadaan tanaman untuk TPA, pembangunan jembatan, pembangunan hanggar alat berat, pemeliharaan CCTV
49	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	60.000.000	60.000.000	0	
50	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan	792.000.000	962.000.000	170.000.000	Penambahan Tiping fee untuk TPA Banjarbakula
	Penyediaan Sarana dan Prasarana	19.262.050.050	28.417.260.450	9.155.210.400	

51	Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				penambahan BBM, pelumas, suku cadang, pengadaan penutup bak truk sampah (terpal), pengadaan pakai lapangan, penambahan gaji petugas persampahan dua bulan, pemeliharaan bak kontainer, pengadaan roundup, sewa tanah TPS, pengadaan penambahan bak kontainer 10 unit, pengadaan pickup 3 unit, pengadaan excavator mini 1 unit, pengadaan truk amroll 3 unit, pembuatan pagar dan perkerasan TPS di kelurahan sungai ulin, pembangunan TPS di kelurahan sungai besar, pembuatan fondasi dan urugan TPS di kelurahan landasan ulin Utara, belanja pemeliharaan tempat penampung sampah, pembuatan DED TPS3 R dan PDU di kelurahan cempaka
52	Fasilitasi Pemenuhan ketentuan terkait izin usaha dan Standar Teknis pengelolaan Sampah	148.000.000	263.500.000	115.500.000	Gaji petugas retribusi 2 bulan, biaya operasional E Retribusi sampah pada PT Air Minum Intan Banjar.
53	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	40.000.000	40.000.000	0	

54	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/kota	678.797.400	1.924.147.400	1.245.350.000	Penambahan makan minum rapat, pengadaan pakaian lapangan, perjalanan dinas dalam daerah, pengadaan kulkas sample, kulkas prezer 1 unit, pemeliharaan peralatan kantor, pemeliharaan kendaraan operasional, pemeliharaan Gedung dan bangunan, belanja mebel, pengadaan PC all in, pengadaan drone, dispenser, genset 2000watt, pengadaan mobil operasional, pengadaan alat laboratorium.
JUMLAH ANGGARAN		39.579.493.425	59.984.463.282	20.404.969.857	

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Sebagaimana termuat dalam table berikut ini:

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														Formulir RKPA-BELANJA SKPD							
Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023																					
Organisasi : 2.11.1.03.1.04.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																					
REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																					
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduka	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduka	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					32.510.643.825	7.068.849.600	0	0	39.579.493.425	41.773.442.920	19.445.099.100	0	0	61.218.542.020	21.639.048.595	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.570.215.325	827.547.000	0	0	8.397.762.325	7.872.868.920	1.513.764.000	0	0	9.386.632.920	988.870.595	
2	11	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					55.000.000	0	0	0	55.000.000	152.590.000	0	0	0	152.590.000	97.590.000	
2	11	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0		
2	11	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.000.000	0	0	0	30.000.000	127.590.000	0	0	0	127.590.000	97.590.000		

2	11	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.011.477.805	0	0	0	6.011.477.805	6.230.764.920	0	0	0	6.230.764.920	219.287.115	
2	11	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5.965.382.805	0	0	0	5.965.382.805	6.184.669.920	0	0	0	6.184.669.920	219.287.115	
2	11	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		46.095.000	0	0	0	46.095.000	46.095.000	0	0	0	46.095.000	0	
2	11	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			36.500.000	0	0	0	36.500.000	36.500.000	0	0	0	36.500.000	0	
2	11	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		16.500.000	0	0	0	16.500.000	16.500.000	0	0	0	16.500.000	0	
2	11	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	
2	11	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			499.979.000	42.400.000	0	0	542.379.000	690.194.000	42.400.000	0	0	732.594.000	190.215.000	
2	11	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.058.000	0	0	0	10.058.000	10.058.000	0	0	0	10.058.000	0	
2	11	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.396.500	0	0	0	3.396.500	3.396.500	0	0	0	3.396.500	0	

2	11	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			17.415.000	0	0	0	17.415.000	17.415.000	0	0	0	17.415.000	0	
2	11	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			297.414.500	0	0	0	297.414.500	347.399.500	0	0	0	347.399.500	49.985.000	
2	11	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			7.214.000	0	0	0	7.214.000	7.214.000	0	0	0	7.214.000	0	
2	11	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			4.400.000	0	0	0	4.400.000	4.400.000	0	0	0	4.400.000	0	
					(UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP)															
2	11	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.776.000	0	0	0	1.776.000	1.776.000	0	0	0	1.776.000	0	
2	11	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	
2	11	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			126.810.000	0	0	0	126.810.000	267.040.000	0	0	0	267.040.000	140.230.000	

2	11	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			26.795.000	0	0	0	26.795.000	26.795.000	0	0	0	26.795.000	0	
2	11	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.700.000	42.400.000	0	0	45.100.000	2.700.000	42.400.000	0	0	45.100.000	0	
2	11	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.190.000	343.787.000	0	0	344.977.000	1.190.000	1.030.004.000	0	0	1.031.194.000	686.217.000	
2	11	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0	0	0	0	0	486.306.000	0	0	486.306.000	486.306.000	
2	11	01	2,07	05	Pengadaan Mebel (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			510.000	102.218.000	0	0	102.728.000	510.000	177.218.000	0	0	177.728.000	75.000.000	
2	11	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	124.937.000	0	0	124.937.000	0	249.848.000	0	0	249.848.000	124.911.000	
					(DINAS LINGKUNGAN HIDUP)															
2	11	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			680.000	99.320.000	0	0	100.000.000	680.000	99.320.000	0	0	100.000.000	0	

2	11	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2.598.000	0	0	2.598.000	0	2.598.000	0	0	2.598.000	0	
2	11	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	14.714.000	0	0	14.714.000	0	14.714.000	0	0	14.714.000	0	
2	11	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				728.408.520	0	0	0	728.408.520	473.970.000	0	0	0	473.970.000	(254.438.520)	
2	11	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			299.655.000	0	0	0	299.655.000	120.700.000	0	0	0	120.700.000	(178.955.000)	
2	11	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			98.990.000	0	0	0	98.990.000	98.990.000	0	0	0	98.990.000	0	
2	11	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.800.000	0	0	0	10.800.000	10.800.000	0	0	0	10.800.000	0	
2	11	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			318.963.520	0	0	0	318.963.520	243.480.000	0	0	0	243.480.000	(75.483.520)	
2	11	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				237.660.000	441.360.000	0	0	679.020.000	287.660.000	441.360.000	0	0	729.020.000	50.000.000	

2	11	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			9.000.000	0	0	0	9.000.000	59.000.000	0	0	0	59.000.000	50.000.000	
2	11	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			172.000.000	0	0	0	172.000.000	172.000.000	0	0	0	172.000.000	0	
2	11	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			12.100.000	0	0	0	12.100.000	12.100.000	0	0	0	12.100.000	0	
2	11	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			29.920.000	0	0	0	29.920.000	29.920.000	0	0	0	29.920.000	0	
2	11	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	441.360.000	0	0	441.360.000	0	441.360.000	0	0	441.360.000	0	

2	11	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14.640.000	0	0	0	14.640.000	14.640.000	0	0	0	14.640.000	0	
					(DINAS LINGKUNGAN HIDUP)															
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				892.986.000	0	0	0	892.986.000	992.986.000	0	0	0	992.986.000	100.000.000	
2	11	02	2,01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				189.238.500	0	0	0	189.238.500	289.238.500	0	0	0	289.238.500	100.000.000	
2	11	02	2,01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			189.238.500	0	0	0	189.238.500	289.238.500	0	0	0	289.238.500	100.000.000	
2	11	02	2,02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				703.747.500	0	0	0	703.747.500	703.747.500	0	0	0	703.747.500	0	
2	11	02	2,02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			281.850.000	0	0	0	281.850.000	281.850.000	0	0	0	281.850.000	0	
2	11	02	2,02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			421.897.500	0	0	0	421.897.500	421.897.500	0	0	0	421.897.500	0	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				863.801.600	26.656.000	0	0	890.457.600	1.114.451.400	501.006.000	0	0	1.615.457.400	724.999.800	
2	11	03	2,01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				758.676.800	21.850.000	0	0	780.526.800	1.009.326.700	496.200.000	0	0	1.505.526.700	724.999.900	

2	11	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			214.999.900	0	0	0	214.999.900	275.999.800	14.000.000	0	0	289.999.800	74.999.900	
2	11	03	2,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			65.000.000	0	0	0	65.000.000	65.000.000	0	0	0	65.000.000	0	
					Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)															
2	11	03	2,01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			478.676.900	21.850.000	0	0	500.526.900	668.326.900	482.200.000	0	0	1.150.526.900	650.000.000	
2	11	03	2,02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				20.193.800	4.806.000	0	0	24.999.800	20.193.800	4.806.000	0	0	24.999.800	0	
2	11	03	2,02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			20.193.800	4.806.000	0	0	24.999.800	20.193.800	4.806.000	0	0	24.999.800	0	
2	11	03	2,03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				84.931.000	0	0	0	84.931.000	84.930.900	0	0	0	84.930.900	(100)	

2	11	03	2,03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	
2	11	03	2,03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			29.931.000	0	0	0	29.931.000	29.930.900	0	0	0	29.930.900	(100)	
2	11	03	2,03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				1.098.896.400	1.789.600.000	0	0	2.888.496.400	1.374.952.400	4.749.502.500	0	0	6.124.454.900	3.235.958.500	
2	11	04	2,01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				1.098.896.400	1.789.600.000	0	0	2.888.496.400	1.374.952.400	4.749.502.500	0	0	6.124.454.900	3.235.958.500	
2	11	04	2,01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.000.000	20.000.000	0	0	25.000.000	5.000.000	20.000.000	0	0	25.000.000	0	
2	11	04	2,01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			183.250.000	3.750.000	0	0	187.000.000	204.850.000	3.750.000	0	0	208.600.000	21.600.000	

2	11	04	2,01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			810.653.400	1.765.850.000	0	0	2.576.503.400	1.039.623.400	4.725.752.500	0	0	5.765.375.900	3.188.872.500	
2	11	04	2,01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)				99.993.000	0	0	0	99.993.000	125.479.000	0	0	0	125.479.000	25.486.000	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				50.019.900	0	0	0	50.019.900	55.019.900	0	0	0	55.019.900	5.000.000	
2	11	05	2,01		Penyimpanan sementara Limbah B3				50.019.900	0	0	0	50.019.900	55.019.900	0	0	0	55.019.900	5.000.000	
2	11	05	2,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			35.020.400	0	0	0	35.020.400	35.020.400	0	0	0	35.020.400	0	
					(DINAS LINGKUNGAN HIDUP)															
2	11	05	2,01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			14.999.500	0	0	0	14.999.500	19.999.500	0	0	0	19.999.500	5.000.000	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN				382.071.200	52.598.000	0	0	434.669.200	485.571.200	59.098.000	0	0	544.669.200	110.000.000	

					PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)															
2	11	06	2,01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				382.071.200	52.598.000	0	0	434.669.200	485.571.200	59.098.000	0	0	544.669.200	110.000.000	
2	11	06	2,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			100.000.000	0	0	0	100.000.000	135.000.000	0	0	0	135.000.000	35.000.000	
2	11	06	2,01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			24.999.400	0	0	0	24.999.400	24.999.400	0	0	0	24.999.400	0	
2	11	06	2,01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			257.071.800	52.598.000	0	0	309.669.800	325.571.800	59.098.000	0	0	384.669.800	75.000.000	
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA),				40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	
					KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH															
2	11	07	2,01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH				40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	

2	11	07	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				255.000.000	0	0	0	255.000.000	305.000.000	0	0	0	305.000.000	50.000.000	
2	11	08	2,01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				255.000.000	0	0	0	255.000.000	305.000.000	0	0	0	305.000.000	50.000.000	
2	11	08	2,01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			155.000.000	0	0	0	155.000.000	155.000.000	0	0	0	155.000.000	0	
2	11	08	2,01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			100.000.000	0	0	0	100.000.000	150.000.000	0	0	0	150.000.000	50.000.000	
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				178.273.600	0	0	0	178.273.600	238.273.600	0	0	0	238.273.600	60.000.000	
2	11	09	2,01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah				178.273.600	0	0	0	178.273.600	238.273.600	0	0	0	238.273.600	60.000.000	

					Kabupaten/Kota															
2	11	09	2,01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		178.273.600	0	0	0	178.273.600	238.273.600	0	0	0	238.273.600	60.000.000		
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			24.999.900	0	0	0	24.999.900	27.619.900	0	0	0	27.619.900	2.620.000		
2	11	10	2,01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			24.999.900	0	0	0	24.999.900	27.619.900	0	0	0	27.619.900	2.620.000		
2	11	10	2,01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		24.999.900	0	0	0	24.999.900	27.619.900	0	0	0	27.619.900	2.620.000		
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			21.154.379.900	4.372.448.600	0	0	25.526.828.500	29.266.699.600	12.621.728.600	0	0	41.888.428.200	16.361.599.700		
2	11	11	2,01		Pengelolaan Sampah			20.966.379.900	4.372.448.600	0	0	25.338.828.500	28.963.199.600	12.621.728.600	0	0	41.584.928.200	16.246.099.700		
2	11	11	2,01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		830.802.400	356.917.600	0	0	1.187.720.000	913.182.400	372.637.600	0	0	1.285.820.000	98.100.000		

2	11	11	2,01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			3.048.087.450	988.971.000	0	0	4.037.058.450	3.909.327.450	6.817.731.000	0	0	10.727.058.450	6.690.000.000	
2	11	11	2,01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			48.000.000	12.000.000	0	0	60.000.000	48.000.000	12.000.000	0	0	60.000.000	0	
2	11	11	2,01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			792.000.000	0	0	0	792.000.000	962.000.000	0	0	0	962.000.000	170.000.000	
2	11	11	2,01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			16.247.490.050	3.014.560.000	0	0	19.262.050.050	23.130.689.750	5.419.360.000	0	0	28.550.049.750	9.287.999.700	
2	11	11	2,03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta				188.000.000	0	0	0	188.000.000	303.500.000	0	0	0	303.500.000	115.500.000	

2	11	11	2,03	01	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			148.000.000	0	0	0	148.000.000	263.500.000	0	0	0	263.500.000	115.500.000	
2	11	11	2,03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)			40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan 2023 Dinas Lingkungan Hidup ini merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 khususnya, dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program dan usulan masyarakat melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Banjarbaru yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2023 ini dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023, di dalam implementasinya perlu dilengkapi dengan dokumen turunan ataupun dokumen pelengkap (Petunjuk Operasional, Kerangka Acuan Kerja dan lain- lain) agar lebih mudah dalam implementasi dan pengoperasionalannya serta lebih memudahkan dalam pengendalian dan evaluasi pencapaian target dan kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutannya.

Dengan demikian tujuan utama untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat segera terwujud.